

MAKALAH



MEMAHAMI DASAR-DASAR ILMU POLITIK

**POKOK-POKOK PIKIRAN DISAMPAIKAN PADA KULIAH
MATRIKULASI MAHASISWA BARU SEMESER GANJIL
2022/2023 PROGRAM MAGISTER ILMU POLITIK, SEKOLAH
PASCASARJAN, UNIVERSITAS NASIONAL DI KAMPUS
MENARA UNAS RAGUNAN, JAKARTA SELATAN PADA
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2022**

**Dr. Asran Jalal, Drs, M.Si
NIDN: 0328106101**

**UNIVERSITAS NASIONAL
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
TAHUN 2022**

Latar Belakang

Setiap ilmu atau ilmu pengetahuan (*science*), baik itu ilmu alam (eksakta) maupun ilmu-ilmu sosial memiliki beberapa syarat, sehingga disebut sebagai satu disiplin ilmu atau satu cabang ilmu pengetahuan. Syarat dimaksud antara lain yaitu: (1) fokus studi; (2) metodologi; (3) institusi pengembangan ilmu; (4) organisasi profesi (The Liang Gie 1986).

Tulisan ini mengacu pada persyaratan ilmu tersebut di atas. Pokok bahasan mencakup fokus studi ilmu politik, metodologi ilmu politik, institusi pengembangan ilmu politik, dan organisasi profesi ilmu politik. Pembahasan fokus studi ilmu politik mencakup pandangan ilmuwan politik tentang pengertian ilmu politik, politik perbedaan fokus studi disiplin ilmu politik dengan ilmu kebijakan publik, ilmu hukum, perspektif ilmu politik, dan pendekatan-pendekatan ilmu politik. Pertanyaan yang diajukan adalah apa yang menjadi fokus utama ilmu politik sebagai satu disiplin ilmu? Apa yang membedakannya dan keterkaitannya dengan ilmu kebijakan publik, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi yang tergolong ke dalam ilmu-ilmu sosial?

Fokus Studi Ilmu Politik

Fokus studi ilmu politik dapat ditelusuri melalui pemaknaan para ilmuwan politik tentang pengertian ilmu politik. Ilmuwan politik memaknai pengertian ilmu politik menjadi 2 perspektif yaitu mengartikan ilmu politik pada satu fokus tertentu dan mengartikan ilmu politik lebih dari satu fokus. Kelompok ilmuwan politik yang mengartikan ilmu politik pada fokus tertentu antara lain. Laswell (1972), studi ilmu politik merujuk pada siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana (*who gets what, when, how*). W.A. Robson (1954), memaknai ilmu politik Ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu. Goodin, Robert E & Klingemann, Han Dieter

(1998), mengartikan ilmu politik sebagai studi yang mempelajari perebutan kekuasaan. Apter (1977; 3-24), mengartikan ilmu politik sebagai studi tentang kekuasaan politik mencakup kekuasaan publik dan kekuasaan kelompok.

Ilmuwan politik memaknai ilmu politik lebih dari satu fokus. Para ilmuwa politik yang mengartikan ilmu politik lebih dari satu fokus antara lain adalah Surbakti, Ramlan (1992), menyatakan ilmu politik adalah studi tentang: (1) Ideologi (*Ideology*); (2) negara dan pemerintah; (3) kebijakan umum; (4) kekuasaan; (6) Konflik (The Liang Gie, 1986; 101-112), ilmu politik merupakan studi tentang: (1) negara; (2) pemerintahan; (3) kekuasaan; (4) fakta politik; (5) organisasi masyarakat; (6) kegiatan Politik.

Pengertian ilmu politik sebagai studi negara tentang ideologi, ilmu politik fokus pada studi-studi ideologi berbagai negara dan ideologi organisasi politik. Pengertian ilmu politik fokus pada negara, mengartikan ilmu politik fokus pada terbentuknya negara, hubungan negara an masyarakat, dan hubungan antar negara. Pengertian ilmu politik sebagai studi tentang pemerintahan. Perspektif pemerintahan ini, ilmu politik diapandang sebagai ilmu yang mempelajari, mendiskusikan, dan meneliti tentang bentuk-bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengertian ilmu politik sebagai studi tentang kekuasaan (*power*) memaknai ilmu politik dipandang sebagai ilmu yang mempelajari, mendiskusikan, meneliti tentang memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan. Pengertian ilmu politik merupakan studi tentang kebijakan publik. Perspektif ini memandang ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari, mendiskusikan, dan meneliti tentang terbentuknya kebijakan publik, aktor yang berperan dalam pembuatan kebijakan publik, Aktor yang berperan dalam implementasi kebijakan publik .Pengertian ilmu politik merupakan studi tentang konflik politik. Perspektif ini melihat ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari, mendiskusikan, meneliti tentang konflik antara elite pemeintah, antara pemerintah dengan masyarakat, konflik antar masyarakat akibat kebijakan pemerintah atau negara. Pengertian ilmu politik fokus pada fakta politik, ilmu politik dimaknai studi tentang peristiwa-peristiwa politik tertentu. Ilmu politik fokus pada kegitan politik yakni

keseluruhan kegiatan-kegiatan politik seperti pemilu, menyampaikan pendapat pada pemerintah dan pemerintah daerah, proses pembuatan perundangan dan peraturan.

Fokus studi ilmu politik alternatif. Perspektif ini mengartikan ilmu politik proses persaingan atau konflik dan kompromi atau konsensus antar aktor-aktor politik negara, antara negara dengan masyarakat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kekuasaan dan dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik. Konflik dapat berupa persaingan, perbedaan pendapat, perdebatan, protes, dan tindakan kekerasan fisik. Kekuasaan dimaksud berupa posisi atau jabatan di pemerintahan atau negara. Kebijakan publik mengacu pada perundangan dan peraturan di bawahnya yang mengikat masyarakat secara keseluruhan. Implementasi mengacu pada pelaksanaan kebijakan publik, bisa berbeda dengan rumusan kebijakan, bisa juga menimbulkan umpan balik (*feedback*) dari masyarakat.

Persamaan ilmu politik dengan disiplin ilmu kebijakan publik, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi terletak pada objek utamanya yakni perilaku masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.. Perbedaan utama antara fokus studi disiplin ilmu politik dengan disiplin ilmu sosial tersebut di atas, rumusannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Perbedaan Objek Studi Ilmu politik dengan Kebijakan Publik, Hukum, dan Ekonomi

Objek	Ilmu Politik	Kebijakan Publik	Ilmu Hukum	Ekonomi
Objek Utama	1.Konflik dan Konsensus mempertahankan dan memperjuangkan kekuasaan. 2.Konflik dan konsensus dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan publik	1.Model dan pendekatan kebijakan publik, aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik. 2.Model dan dampak implementasi kebijakan publik	1.Merancang perundangan atau peraturan 2.kesesuaian perundangan dan aturan 3. Memutuskan perkara berdasarkan perundangan	1.Mengelola dan mencari sumber-sumber ekonomi 2.Mengatur lembaga-lembaga ekonomi

Sumbangan ilmu kebijakan publik pada ilmu politik adalah teori-teori kebijakan public seperti pendekatan, model, dan aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan publik dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan politik untuk menjelaskan fenomena politik. Sumbangan ilmu hukum pada ilmu politik adalah perumusan Undang-Undang dan peraturan-peraturan, pelaksanaan, pelanggaran perundangan, dan keputusan pengadilan tentang kasus kekerasan politik dan kasus korupsi, dapat dijadikan bahan studi pada ilmu politik. Sumbangan ilmu ekonomi pada ilmu politik yaitu pertama, studi hubungan fenomena politik dan ekonomi sudah menjadi salah satu subdisiplin ilmu politik. Kedua, teori-teori ekonomi digunakan oleh ilmuwan politik untuk membahas dan meneliti fenomena politik. Menggunakan teori ekonomi membahas fenomena politik. Contoh Organski, A.F.K (1965). menjelaskan tahap-tahap perkembangan politik, dengan menggunakan teori ekonomi Rostow, W.W (1991), yang menjelaskan tahap-tahap perkembangan ekonomi.

Perspektif Ilmu Politik

Apter, David (1977; 3-20), membedakan 3 perspektif ilmu politik yaitu perspektif intelektual, perspektif politisi, dan perspektif ilmu politik. Perspektif intelektual menggunakan diri sendiri sebagai titik tolak. Seseorang hendak berniat untuk melakukan perubahan tentang keadaan suatu negara, dia akan mengemukakan pemikirannya, tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki. Perspektif politisi, pandangan politisi lebih menaruh perhatian pada hal yang bersifat praktis, ketimbang hal yang bersifat teoritis. Politisi menaruh perhatian terutama pada kegunaan dari kekuasaan. Politisi membutuhkan kekuasaan dan ingin mempergunakannya, kekuasaan merupakan sarana dan tujuannya. Perspektif ilmu politik yakni memandang politik sebagai ilmu. Kecenderungan ke arah pertimbangan kritis, dan memiliki kriteria yang lebih sistematis dalam menilai politik. memperhatikan memandang ke depan, meramalkan tindakan politik dan kebijakan para politisi atau pilihan para intelektual.

Pendekatan Ilmu Politik

Pendekatan ilmu politik dikategorikan menjadi dua yaitu pendekatan ilmu politik murni dan pendekatan hibrid. Pendekatan ilmu politik murni hanya memanfaatkan konsep-konsep ilmu politik untuk memahami peristiwa politik. Pendekatan ini melahirkan pendekatan tradisional (*traditional approach*), pendekatan perilaku (*behaviour approach*), dan pendekatan pascaperilaku (*postbehaviour approach*). Perbedaan pendekatan tersebut tertulis pada tabel berikut.

Tabel 2. Pendekatan Ilmu Politik Murni

Komponen	Tradisionalisme	Behavioralisme	Post-behavioralisme
Fokus	Lembaga formal, norma dan historis	Perilaku dalam lembaga, empiris	Perilaku, lembaga, norma, dan historis.
Hubungan dengan nilai	Bebas nilai (<i>value free</i>)	Tidak bebas nilai	Kombinasi (bebas nilai dan tidak bebas nilai)
Fungsi penelitian	Mengungkap informasi politik	Pembentukan teori	Pembentukan teori sumbangan kebijakan
Metode	Kualitatif	Kuantitatif	Kuantitatif dan kualitatif

Sumber: Varma, SP (1985; 17-50).

Ilmu memiliki pendekatan yang disebut pendekatan hibrid (*Hybrid Approach*) yakni kombinasi dua disiplin ilmu jadi subdisiplin ilmu politik. Pendekatan ini melahirkan ekonomi politik (*political economy*), psikologi politik (*political psychology*), Sosiologi politik (*political sociology*) (Dogan, Mattei, 1996). Ekonomi politik, merupakan pendekatan dalam ilmu politik memahami hubungan dua fenomena yakni fenomena politik dan ekonomi, dan menggunakan teori ekonomi untuk memahami fenomena politik. Psikologi politik menekankan pada pembahasan aspek-aspek psikologi dalam menganalisis fenomena politik. Sosiologi politik menganalisis aspek-aspek dimensi politik dalam interaksi individu dalam kelompok dan interaksi antar kelompok-kelompok masyarakat.

Subdisiplin Ilmu Politik

Ilmu politik memiliki subdisiplin yaitu filsafat politik (*political philosophy*), institutionalisme (*institutionalism*), behavioralisme (*behavioralism*), pluralisme (*pluralism*), strukturalisme (*structuralism*), dan pembangunan (*developmentalism*) (Apter, 1977; 3-20), perbandingan politik (*comparative politics*), hubungan internasional (*international relations*), teori politik (*political theory*), kebijakan publik (*public policy*), metodologi politik (*political methodology*) Robert E. Goodin dan dkk (1996).

Filsafat politik pada dasarnya membahas ilmu politik fokus pada bahasan aspek-aspek dasar filosofi ilmu politik. Biasanya menggali pemikiran-pemikiran politik para pemikir politik seperti Plato, Aristoteles, dan lainnya. Institutionalisme pada dasarnya fokus membahas ilmu politik menitik beratkan pada lembaga-lembaga politik, seperti kelompok kepentingan, partai politik, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga legislatif. Behavioralisme, kajian ilmu politik fokus pada perilaku elite ketika berinteraksi dengan elite lainnya dan berinteraksi dengan masyarakat. Aktifitas masyarakat dalam proses politik. Pluralisme, membahas ilmu politik fokus pada kelompok-kelompok politik dan perannya dalam proses politik, seperti kelompok primordial dan kelompok etnis. strukturalisme, pembahasan ilmu politik fokus pada bahasan hubungan kelas atau tingkatan dalam masyarakat hubungannya dengan proses politik, seperti studi hubungan negara masyarakat, hubungan negara dengan kelas kapitalisme. Pendekatan pembangunan, ilmu politik mengutamakan pembahasan aspek pembangunan politik, seperti pembangunan demokrasi, perkembangan desentralisasi, pembangunan partai politik

Subdisiplin ilmu politik lainnya adalah perbandingan politik (*comparative politics*), studi ilmu politik menekankan perbandingan fenomena politik dua negara atau lebih. hubungan Internasional (*international relations*), menekankan berkaitan dengan kepentingan, kompromi, dan consensus dalam hubungan internasional. teori politik (*political theory*), menekankan pada pembahasan tentang teori-teori politik bidang tertentu. kebijakan publik (*public policy*), menekan pembahasan interaksi aktor dalam merumuskan dan implementasi kebijakan publik. metodologi politik (*political*

methodology), menekan pembahasa pengetahuan tentang keseluruhan aspek metode dalam ilmu politik Robert E. Goodin et al (1996).

Metodologi Ilmu Politik

Ilmu politik memiliki metodologi sendiri yang disebut metodologi ilmu politik. Metodologi ilmu politik, yakni pengkajian terhadap metode, teknik, kriteria, alat analisis, tingkat ketepatan, dan penarikan kesimpulan yang logis untuk memperoleh pengetahuan tentang ilmu politik. Ruang lingkup metodologi ilmu politik: (1) abstraksi, kaidah untuk pemilahan, penilaian, dan penerapan teori dalam praktek; (2) ilmu politik bekerja secara terfragmentasi dan terpadu; (3) daerah spesialisasi: tema, teori, dan lapangan ilmu politik memiliki perhatian terhadap nasib manusia; (4) bahasa ilmu politik: abstrak seperti kekuasaan, demokrasi, struktur, dan variabel dan harus didefinisikan; (5) analisis dalam ilmu politik. (Apter, 1977).

Analisis ilmu politik: (1) paradigma: kerangka acuan dari ide-ide yang membentuk konteks umum bagi analisis; (2) teori: pernyataan umum dari hubungan beberapa variabel; (3) metode: cara menyusun teori untuk diaplikasikan pada data; (4) teknik menghubungkan metode dengan data yang relevan; (5) model: cara sederhana untuk menggambarkan hubungan-hubungan. Model dapat dibangun dari paradigma, teori, metode atau teknik; (6) strategi: cara khusus menerapkan satu atau kombinasi hal tersebut di atas terhadap masalah penelitian; (7) rancangan penelitian: mengubah strategi menjadi rencana operasional untuk kerja lapangan.

Ilmu politik juga memiliki metode penelitian yakni proses dan tahapan untuk mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, dan menguji teori. (Kweit, Mary Grisez dkk., 1981). Pendekatan penelitian ilmu politik yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Perbedaan kedua pendekatan tersebut antara lain adalah pendekatan penelitian kualitatif menekankan pada memaknai hubungan-hubungan fenomena politik, pendekatan penelitian kuantitatif menghitung hubungan-hubungan fenomena politik. (Harrison, 2001; 19-52).

Institusi Pengembangan Ilmu dan Organisasi Profesi

Institusi pengembangan ilmu adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi di Indonesia baik universitas negeri dan universitas swasta, memiliki program studi ilmu politik 1 (sarjana, strata 2 (magister), dan strata 3 (doktor). Universitas negeri yang memiliki program studi dimaksud antara lain Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada UGM), dan Universitas Padjdjaran (Unpad). Universitas swasta yang memiliki program studi ilmu politik strata 1 (sarjana), strata 2 (magister), dan strata 3 (doktor), antara lain adalah Universitas Nasional (Unas).

Ilmu politik di Indonesia sudah memiliki organisasi profesi yakni Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. (AIPI). AIPI didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1985. AIPI merupakan organisasi yang menghimpun sarjana ilmu politik semua strata pendidikan, berbagai latar belakang profesi seperti dosen, politisi dan birokrat. AIPI memiliki cabang di seluruh Indonesia, dengan kegiatan seminar dan publikasi hasil seminar dalam bentuk jurnal dan buku. Ilmu Politik juga memiliki asosiasi Dosen Ilmu Politik Indonesia (ADIPI) yang didirikan pada tanggal 12 Juni 2014. Program kerja ADIPI yaitu pertemuan ilmiah, publikasi ilmiah (CEPP-FISIP-UI). ADIPI merupakan wadah dosen ilmu politik untuk menghasilkan karya-karyanya.

Kesimpulan

Ilmu politik merupakan sebuah disiplin ilmu, karena ilmu politik memiliki syarat sebagai suatu disiplin ilmu. Syarat dimaksud yaitu pertama, memiliki objek studi khusus berbeda dengan fokus studi ilmu sosial lainnya seperti kebijakan publik, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi. Kedua, memiliki metodologi untuk mencari ilmu dan mengembangkan teori yang disebut metodologi ilmu politik. Ketiga, memiliki program studi ilmu politik strata 1, strata 2, dan strata 3 pada universitas negeri dan universitas swasta di Indonesia; (4) memiliki organisasi profesi yakni Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) sebagai wadah para sarjana ilmu politik semua strata pendidikan, berbagai latar belakang pekerjaan dan

profesi, dan Asosiasi Dosen Ilmu Politik Indonesia (ADIPI) sebagai wadah dosen mengembangkan profesinya.

Daftar Pustaka

- Apter, David (1977; 3-24). *Introduction to Political Analysis*, Winthrop Publisher Inc: Cambridge, Massachusetts.
- Dogan, Mattei (1996). "Political Science and the Other Social Science", Robert E. Goodin & Hans-Dieter Klingemann (eds), *A New Handbook of Political Science*, New York, Oxford University Press.
- Goodin, Robert E. & Hans-Dieter Klingemann (1996). "Political Science The Discipline", Robert E. Goodin & Hans-Dieter Klingemann (eds), *A New Handbook of Political Science*, New York, Oxford University Press.
- Harrison, Lisa (2001; 19-52), *Political Research: An Introduction*, Routledge: Psychology Press.
- Kweit, Mary Grisez & Robert W. Kweit (1981). *Concepts and Methods for Political Analysis*, NJ: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Laswell, Harold D. (1972). *Politics, Who gets What, When, How*, New York: World Publishing Co.
- Organski, A.F.K (1965). *The Stages of Political Development* New York: Alfred A. Knopf.
- Rostow, W.W. (1991). *The Stages of Economic Growth A Non-Communist Manifesto*, (3rd), Cambridge: Cambridge University Press.
- Surbakti, Ramlan (1992). *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- The Liang Gie (1986; 101-112). *Ilmu Politik*, Yogyakarta: Yayasan Studi Ilmu Teknologi.
- Varma, SP (1985; 17-50). *Teori Politik Modern*, Jakarta: Grafiti Press.
- W.A, Robson (1954). *The University Teaching of Social Sciences: Political Science*, Paris: UNESCO.